

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA
TERHADAP BAHAN ACARA NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam Indonesia Raya

Yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya.

Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda DIY

Yang kami hormati, rekan-rekan Anggota Dewan

Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa lainnya

beserta para hadirin sekalian

Pertama tama kami sampaikan Puja dan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD D.I Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Kedua, Kepada Pimpinan Rapat Paripurna kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra

dalam menanggapi penghantaran raperda oleh bapak Gubernur D.I Yogyakarta pada rapat paripurna sebelumnya.

Dan kepada Bapak Gubernur D.I Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih atas penghantaran dan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, pada rapat paripurna Dewan tanggal 15 Januari 2018 kemarin.

Hadirin yang kami hormati,

D.I Yogyakarta beberapa tahun terakhir banyak mengalami persoalan kekurangan pangan. Persoalan tersebut sangat dipengaruhi oleh bencana alam lokal seperti erupsi Gunung Merapi, banjir, kekeringan dan mengurangnya daya dukung lahan pertanian. Persoalan tersebut mengakibatkan jumlah hasil pangan berkurang dan mempengaruhi cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun warga masyarakat D.I Yogyakarta.

Sisi lainnya, persoalan menurunnya jumlah panen dalam bentuk gabah atau beras sebagai bahan pangan utama sering mengalami persoalan, mulai dari kegagalan panen, kerusakan oleh hama dan penyakit tanaman, atau persoalan permainan tengkulak dalam tata niaganya. Sedangkan pangan lainnya, seperti pangan lokal non beras masih belum mencukupi sebagai pasokan cadangan pangan.

Hadirin yang kami muliakan

Laju pertambahan penduduk di D.I Yogyakarta baik penduduk D.I Yogyakarta sendiri maupun pendatang setiap tahunnya terus bertambah. Konteks ini tentu membutuhkan perhitungan cadangan pangan yang dimiliki D.I Yogyakarta agar D.I Yogyakarta tidak mengalami kelangkaan pangan.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah mengenai cadangan pangan yang harus tersedia setiap saat sebagai tindakan pengamanan pangan ketika terjadi bencana alam lokal karena D.I Yogyakarta termasuk daerah yang sering terjadi bencana alam lokal.

Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa produktivitas D.I Yogyakarta dalam pemenuhan kebutuhan pangan cukup karena hasil panen dalam D.I Yogyakarta dan ditambah dari luar D.I Yogyakarta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sisi lainnya pasokan bahan pangan cukup lancar dengan dukungan moda transportasi yang berkembang mempunyai kecepatan distribusi pangan.

Fraksi Partai Gerindra melihat beberapa persoalan yang muncul adalah mengenai perhitungan jumlah cadangan pangan, mekanisme penyimpanan bahan pangan, proses distribusi, kerjasama pengelolaan, hingga mekanisme tata niaga bahan pangan sebagai konsep ketahanan pangan D.I Yogyakarta. Tentu saja dalam peraturan daerah mengenai ketahanan pangan harus dimulai dari mekanisme pengaturan, pengadaan, penggudangan, dan distribusi untuk program ketahanan pangan.

Menyikapi rancangan perda mengenai ketahanan pangan, Fraksi Partai Gerindra sangat sependapat untuk segera direalisasikan peraturan daerah tentang ketahanan pangan dan disegerakan realisasinya sesuai kondisi perkembangan kebutuhan warga masyarakat D.I Yogyakarta. Beberapa pertanyaan yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

1. Mengenai mekanisme pengadaan pangan untuk cadangan ketahanan pangan seharusnya diatur mulai dari proses pengadaan, penggudangan, kerjasama dengan pihak lain, hingga proses distribusinya. Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa proses ini sudah detail di atur dalam mekanisme raperda ketahanan pangan.

Pertanyaannya adalah bagaimana mengatur kewenangan antar institusi dalam proses pengadaan pangan, penggudangan, mekanisme kerjasama, hingga proses distribusinya?

2. Di beberapa kabupaten ataupun kota di D.I Yogyakarta belum mempunyai sistem penggudangan dan distribusi yang baik atau standar kelayakan nasional soal pangan, khususnya beras sebagai bahan pokok pangan masyarakat. Tentu saja proses pengadaan tersebut membutuhkan

kebijakan baru untuk memenuhi standarisasi sistem pergudangan beras khususnya.

Pertanyaannya : bagaimana pemerintah daerah dalam peraturan ketahanan pangan tersebut membangun strategi dan realisasi atas pengadaan, penggudangan dan proses pendistribusiannya?

3. Dalam mekanisme kerjasama program ketahanan pangan disebutkan bahwa pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan pihak lain.

Pertanyaannya : bagaimana pemerintah daerah mengatur proses kerjasama tersebut agar mampu mengatasi persoalan kekurangan pangan, khususnya jika terjadi peristiwa peristiwa bencana alam yang membutuhkan cadangan pangan cukup banyak?

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Gerindra D.I Yogyakarta tentang rencana peraturan daerah ketahanan pangan. Fraksi Partai Gerindra berharap pemerintah daerah mampu mengatasi segala bentuk kekurangan pangan dalam kondisi apapun dalam program ketahanan pangan. Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra , atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam Indonesia Raya

Yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya.

Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda DIY

Yang kami hormati, rekan-rekan Anggota Dewan

Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa lainnya

beserta para hadirin sekalian

pertama tama kami sampaukan Puja dan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD D.I Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Kepada Pimpinan Rapat Paripurna kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra dalam

menanggapi penghantaran raperda oleh bapak Gubernur D.I Yogyakarta pada rapat paripurna sebelumnya.

Hadirin yang kami muliakan.

Kebutuhan pemerintah daerah untuk menyimpan arsip sebagai bagian dari penyimpanan dokumen atau data menjadi penting untuk melacak dokumen kerja, dokumen surat menyurat, dokumen penelitian ataupun dokumen lain dari sifat biasa ataupun rahasia. Kebutuhan dokumentasi arsip mempunyai peranan penting untuk bisa menjadi acuan jika suatu saat dibutuhkan jejak rekam satu dokumen.

Menyimpan data dalam bentuk arsip dokumen memang sangat dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dokumen tersebut. Sisi positifnya, para pengguna arsip bisa memanfaatkan keberadaan dokumen masa lalu sebagai bagian referensi kerja atau kebutuhan yang lainnya. Perkembangan teknologi untuk kearsipan mulai berubah, dari teknologi cetak konvensional berubah bentuk dalam teknologi digital. Meskipun demikian, teknologi konvensional tetap diperlukan sebagai dokumen yang tersimpan sebagai bukti nyata kerja yang dilakukan.

Hadirin yang kami hormati,

Perubahan teknologi kearsipan dalam bentuk dokumen ke digital lebih banyak dilakukan pada saat ini dengan tujuan penghematan ataupun tujuan penyimpanan yang lebih murah dan aman. Proses digitasi dokumen bisa mendukung kekuatan kearsipan yang dilakukan. Fraksi Partai Gerindra dalam pembahasan raperda kearsipan sangat apresiatif karena kedepan pola baru kearsipan, khususnya digitasi arsip akan mampu memberikan perubahan yang menarik tentang teknologi kearsipan.

Dalam pembahasan peraturan daerah tentang kearsipan ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan :

1. Fraksi Partai Gerindra sepakat untuk mendorong teknologi digital dalam pola kearsipan dengan tujuan melakukan penghematan dan pengamanan data.

Pertanyaanya adalah : bagaimana strategi pemerintah daerah mempersiapkan sejak awal mula proses digitasi data dalam praktek tata kelola pemerintahan hingga data dimudahkan dalam proses digitaliasi ?

2. Proses kearsipan data tentu menjadi penting dalam perkembangan pengetahuan. Banyak data-data diperlukan.

Pertanyaannya : sejauh mana masyarakat diperolehkan mengakses data data penting dalam proses kearsipan tersebut ?

3. Proses kearsipan membutuhkan bangunan jaringan penyimpanan yang lebih luas, khususnya dalam bentuk digitalisasi data. Pembangunan teknologi informasi, khususnya penyimpanan data dibutuhkan dalam prosesnya.

Pertanyaannya : bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengupayakan model pengorganiasaian data base yang dilakukan dalam proses kearsipan tersebut?

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Gerindra dalam raperda Penyelenggaraan Kearsipan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terimakasih.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam Indonesia Raya

Yang kami terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya.

Yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda DIY

Yang kami hormati, rekan-rekan Anggota Dewan

Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa lainnya

beserta para hadirin sekalian

Pertama tama kami sampaikan Puja dan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD D.I Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Kedua, Kepada Pimpinan Rapat Paripurna kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra dalam menanggapi penghantaran raperda kelembagaan pemerintah daerah

Istimewa Yogyakarta oleh bapak Gubernur D.I Yogyakarta pada rapat paripurna sebelumnya.

Hadirin yang kami muliakan,

Tujuan membangun kelembagaan dalam konteks penyelegaraan tata pemerintahan adalah terciptanya tata pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mencapai hasil yang maksimal, khususnya dalam memberikan layanan kepada publik. Konsep dan tujuan awal tata pemerintahan tersebut tetap menjadi pijakan utama, atau menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada struktur kelembagaan pemerintahan. Fraksi Partai Gerindra menyadari bahwa proses perubahan kelembagaan di D.I Yogyakarta memang perlu dilakukan sesuai dengan amanat UU No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta yang didalamnya memberikan mandat untuk bisa leluasa mengatur kelembagaan dalam tata pemerintahan daerah.

Fraksi Partai Gerindra tetap mendukung upaya perubahan kelembagaan yang dilakukan tanpa mengurangi nilai dan fungsi kelembagaan tersebut, baik dalam urusan wajib pemerintahan, maupun berbagai tugas pembantuan yang dilaksanakan, atau bisa dikatakan urusan pokok pemerintahan menjadi kewajiban utama dalam pelaksanaan kelembagaan tata pemerintahan.

Hadirin yang kami muliakan

Perubahan kelembagaan yang dilakukan tentu berdampak pada perubahan beberapa kelembagaan, ada yang terjadi pemisahan, ataupun justeru sebaliknya terjadi penggabungan sub kelembagaan dalam tata pemerintahan. Semua proses tersebut mengandung resiko, baik dalam perubahan urusan, hingga berimplikasi pada pembiayaannya. Akan tetapi, Fraksi Partai Gerindra percaya bahwa perubahan kelembagaan yang dilakukan mempunyai tujuan memperbaiki tata pemerintahan yang baik dengan nilai budaya lokal D.I Yogyakarta. Bahkan, tata pemerintahan D.I Yogyakarta kedepan termasuk yang unik, karena memasukkan unsur

kesejarahan kelembagaan yang telah dipunyai dalam kerangka tata pemerintahan modern.

Beberapa pertanyaan yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan kelembagaan yang baru tentu berimplikasi pada perubahan beberapa nama dan nomenklatur kelembagaan.

Pertanyaannya : mohon penjelasan mengenai skema kelembagaan pemerintahan yang baru yang mampu menjalankan urusan wajin dan pembantuan dengan mekanisme kelembagaan yang efektif dan efisien.

2. Dalam struktur kelembagaan yang baru tentu saja ada mekanisme penataan kelembagaan yang jelas dan tegas. Tujuan yang dicapai adalah tersusunnya kelembagaan pemerintah yang tidak tumpang tindih dan punya mekanisme tupoksi yang jelas dan tidak membebani anggaran daerah dalam pelaksanaan tugasnya.

Pertanyaannya : mohon dijelaskan struktur kelembagaan yang baru dan tupoksi yang tidak tumpang tindih dalam menterjemahkan kelembagaan dan urusannya.

3. Struktur kelembagaan yang baru tentunya dituntut ramping, efektif dan efisien. Beberapa proses penggabungan kelembagaan masih perlu ditinjau ulang dan perubahan penggabungan kelembagaan seperti *Upas Pamong Praja* (Satuan Polisi Pamong Praja), dengan *Bebadan Nrang Bancana Praja* (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dalam satu lembaga sesuai kewenangan urusan, yakni urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam satu kelembagaan sesuai kewenangan urusannya.

Pertanyaannya : bagaimana strategi pemerintah daerah mampu melakukan penggabungan kelembagaan dan mengatur berbagai kewenangan untuk terciptanya kelembagaan yang efektif dan efisien sesuai dengan urusan dan kewenangannya ?

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Gerindra mengenai kelembagaan pemerintah daerah D.I Yogyakarta. Fraksi Partai Gerindra

senantiasa mendorong pemerintah daerah D.I Yogyakarta terus memperbaiki tata pemerintahan dan capaian yang diharapkan sesuai dengan outputnya, meskipun banyak perubahan yang bisa dilakukan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan banyak terimakasih.